

**BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) DI DESA BALAM MERAH, KECAMATAN BUNUT,
KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh : Mifta Khoryani

Pembimbing : Risdayani

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

e-mail: miftakhoryani2728@gmail.com¹, risdayati@lecturer.unri.ac.id²

Abstract

This research entitled “Non Cash Food Assistance Program (BPNT) For Beneficiary Families (KPM) In Balam Merah Village, Bunut District, Pelalawan Regency”. This study aims to determine the impact of the assistance program on the social welfare of beneficiary families (KPM). The problem examined in this study are: (1) How is the implementation of non cash food assistance (2) what is the impact of non cash food assistance on welfare. The method used in this research is quantitative research. Data collection techniques in this study in the form observation, guided interviews, and documentation. The population totaled 190 people and the sample in this study was calculated using the slovin formula, then the results were obtained with a total of 66 people. And the results of research show that the implementation of non cash food assistance (BPNT) consisting of 6T was in the good category. The impact of non cash food assistance on welfare is a positive impact is also in the moderate category.

Keyword: *Welfare, Non Cash Food Assistance*

PENDAHULUAN

I LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Sebuah pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Inti dari pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan.

Kemiskinan ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan yang kemudian menjadi ketimpangan. Indonesia adalah negara yang masih menghadapi masalah kemiskinan akut. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah telah banyak membuat program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Namun program yang ada masih belum bisa mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Program dari pemerintah memerlukan adanya evaluasi, salah satunya adalah mengetahui pelaksanaan program, apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum. Pemerintah juga memerlukan pengetahuan tentang dampak dari program yang dibuatnya, agar setiap program yang dibuat dapat berdampak positif dan berguna bagi masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup dan dapat menanggulangi kemiskinan.

Pelaksanaan program bantuan pangan di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 20 tahun, untuk itu perlu adanya penelitian tentang dampak dari program bantuan pemerintah yang sudah berlangsung lama tersebut. Dari pemerintah sendiri sudah melakukan upaya semaksimal mungkin, dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan

pemerintah, mulai dari berbayar sampai digratiskan. Apakah upaya-upaya tersebut mempengaruhi serta berdampak pada kehidupan masyarakat atau tidak. Pelaksanaan dan dampak terhadap masyarakat bisa berjalan beriringan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Jika pelaksanaan sudah dilakukan, maka perlu ditinjau kembali dampak yang ditimbulkan.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Lazarus Ramandey, yang berjudul “Dampak Sosial Program Beras Miskin (Raskin) Di Kampung Amar Kabupaten Mimika” menurut staf kampung telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penerima Raskin terhadap Raskin yang diberikan yaitu sebagian penerima Raskin menjual kembali Raskin yang didapatkan kepada orang lain. Bisa jadi penyimpangan tersebut dilakukan berulang-ulang dan masyarakat bisa menggunakan uang tersebut untuk menukar dengan kebutuhan lain. Tentu saja hal ini dapat berdampak terhadap kerajinan masyarakat. Mereka menjadi malas untuk bekerja karena kebutuhan sudah terpenuhi. Dan adanya penyimpangan dari pihak terkait dalam pelaksanaan BPNT dapat menyebabkan bantuan tidak terlaksana dengan maksimal seperti, jumlah barang tidak senilai dengan jumlah uang yang keluar, tidak bisa memilih barang yang diinginkan, bantuan datang tidak tepat waktu, dan tidak tepat sasaran.

II LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah multidimensi. Dalam rencana strategis kemiskinan disebutkan bahwa dimensi keimiskinan mencakup empat hal pokok, yakni: (1) kurangnya kesempatan, (2) rendahnya kemampuan, (3) kurangnya jaminan dan (4) ketidakberdayaan. Kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik seseorang sehingga secara kumulatif mereka

menyebabkan kerentanan, keterpurukan (*uoi cel-essnes*) dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesejahteraan, sehingga jika seseorang dianggap miskin biasanya dia tidak akan sejahtera. (Yoserizal, 2011, hal. 17)

Menurut (Lewis, 1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualis dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan taphran yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan muustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, ketidaksanggupan).

2.2 Pembangunan

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Sugiyanto, 2019, hal. 7)

Berkembangnya kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berhasilnya suatu perencanaan sosial dalam masyarakat tertentu. Berhasilnya suatu perencanaan sosial akan membawa dampak yang sangat baik terhadap kesejahteraan sosial pada umumnya. Berhasilnya perencanaan sosial dapat dilihat dari digunakannya teknik-teknik baru yang semakin canggih bagi para perencana yang dipekerjakan sejumlah rencana baru. Kesejahteraan sosial adalah wujud perencanaan dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Jika pembangunan sosial terlaksana secara berkelanjutan, maka kesejahteraan sosial akan dicapai oleh masyarakat tertentu. Sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial maka diperlukan adanya konsep perencanaan yang strategis guna memudahkan ruang gerak setiap pekerja sosial nantinya dalam upaya membangun kesejahteraan sosial masyarakat. (Diana, 1981)

Faktor-faktor Pembangunan

- Faktor ekonomis yang primer antara lain sumber alam yang kaya, tenaga kerja massal, modal yang cukup.
- Faktor sosial budaya: kekayaan ekonomis primer tergantung kepada mentalitas, pola tindakan manusia yang terlibat dalam proses pembangunan itu. Sedang pola tindakan ditentukan oleh kuantitas manusia, pola hubungan kemasyarakatan, norma kebudayaan. (Pasaribu & Simandjuntak, 1986)

Dampak adalah suatu benturan atau tubrukan dari dua kepentingan sehingga kedua kepentingan tersebut sama pentingnya bagi manusia. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif yang akan muncul dalam proses waktunya. (Gunawan, 2014)

Dampak dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang muncul sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan pembangunan atau penerapan suatu kebijakan atau program yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan sehingga menghasilkan perubahan pada kehidupan manusia dan masyarakat. (Hadi, 1995)

2.3 Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan

sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Suud, 2006)

Salah satu yang dapat dijadikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan adalah kesejahteraan sosial. setiap program pembangunan selalu berorientasi pada kesejahteraan sosial bagi semua *stakeholder* dimasyarakat. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi perencana, pelaksana, dan pelaku pembangunan. Sosiologi pembangunan selalu memperhatikan nilai-nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. kriteria bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara sosial, ekonomi, dan budaya. (Rohmad, 2016, hal. 11)

III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Dimana isi penelitian yang bersifat tabel, akan dijelaskan secara narasi agar lebih dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Metode yang digunakan adalah dengan menampilkan data-data yang sudah ada yang didapat dalam tabel dan berisi uraian yang bersifat narasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berjumlah 190 Kepala Keluarga (KK) di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

Menurut Ferguson (1976) Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang diambil dari populasi (Sevilla, Ochoa, Punsalan, Regala, & Uriarte, 2006, hal. 160). Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik acak sederhana (*simple random sampling*). Beberapa keunggulan menggunakan metode ini, yaitu pemilihan sampel pada populasi berada dalam nilai

peluang yang sama. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus *Slovin*, dengan toleransi kesalahan sebanyak 10%. Penulis menggunakan rumus *Slovin*, karena jumlah populasi dalam penelitian ini sudah diketahui jumlahnya. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 66 orang. Dan di analisis menggunakan spss 23.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan BPNT

BPNT adalah program bantuan pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat setiap bulannya senilai Rp.200.000. Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) indikator keberhasilan pelaksanaan Program Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilihat dari terwujudnya 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

4.1.1 Tepat Sasaran

Salah satu indikator keberhasilan BPNT dapat dilihat dari ketepatan sasaran KPM. Yaitu Sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini dapat diukur dari pendataan responden di Basis Data Terpadu (BDT), yaitu:

1. Jumlah penghasilan kurang dari Rp.2.000.000 perbulan, dan anggota keluarga lebih dari 3 orang atau jumlah anggota keluarga 1 orang tetapi tidak bekerja.
2. Kepemilikan rumah menumpang, rumah menyewa, atau rumah sendiri tetapi tidak layak huni.
3. Pekerjaan buruh atau petani tetapi luas kebun tidak lebih dari 500m² atau tidak bekerja.

Tepat sasaran dapat diukur apabila KPM tergolong kedalam 3 (tiga) indikator tersebut maka skor 3, apabila KPM hanya tergolong kedalam 2 indikator maka skor 2 (dua), apabila KPM hanya tergolong pada 1 indikator maka skor 1 (satu). Tepat sasaran dapat dikategorikan

kedalam 3 tingkatan yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Untuk melihat ketetapan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Tepat Sasaran

N o	Tepat Sasaran	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)	Skor
1	Tepat	57	86.4	171
2	Kurang Tepat	9	13.6	18
3	Tidak Tepat	0	0	0
	Jumlah	66	100	189
	Kategori	Tinggi		

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 66 orang, sebanyak 57 orang dengan persentase 86.4% memberikan pernyataan tepat dan sebanyak 9 orang dengan persentase 13.6% memberikan pernyataan kurang tepat. Hal ini bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran, yaitu berpenghasilan dibawah RP.2.000.000 perbulan dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 3 orang atau jumlah anggota 1 orang tetapi tidak bekerja, kepemilikan rumah menumpang, menyewa, atau rumah sendiri tapi tidak layak huni, dan pekerjaan buruh atau petani tetapi luas kebun tidak lebih dari 500m² atau tidak bekerja. Penerima BPNT benar dari kalangan masyarakat miskin. Ketepatan sasaran berada dikategori tinggi dengan skor 189.

4.1.2 Tepat Jumlah

Indikator BPNT yang kedua adalah tepat jumlah, Tepat jumlah adalah nilai tukar barang yang diterima KPM setara dengan nilai uang Rp.200.000 per bulan. Bantuan tersebut berupa barang yang mengandung karbohidrat (beras, jagung, dan sagu), protein hewan (Telur,

daging ayam, daging sapi, ikan), protein nabati (kacang-kacangan,tempe dan tahu), vitamin dan mineral (sayur dan buah-buahan) atau diambil sesuai kebutuhan di *E-warong* dan tidak bisa diambil tunai. Untuk melihat ketepatan jumlah yang diterima KPM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Tepat Jumlah

N o	Tepat Jumlah	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)	Skor
1	Tepat	50	75.6	150
2	Kurang Tepat	9	13.7	18
3	Tidak Tepat	7	10.7	7
	Jumlah	66	100	175
	Kategori	Tinggi		

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas dari 66 orang jumlah responden, terdapat 50 orang dengan persentase 75.6% memilih tepat, sebanyak 9 orang dengan persentase 13.7% memilih kurang tepat, 7 orang dengan persentase 10.6% memilih tidak tepat. Jadi dapat diketahui bahwa ketepatan jumlah BPNT yang diterima KPM tergolong dalam kategori tinggi dengan skor 175. Hal ini karena nilai tukar barang yang diterima KPM sudah tepat jumlah. Dan yang memilih kurang tepat dan tidak tepat dikarenakan pilihan dari bahan pangan yang diterima bermacam-macam tidak ditetapkan atau dipaketkan, yaitu dipilih oleh masing-masing KPM. Jadi ada beberapa barang yang jumlahnya dikurangkan atau tidak senilai dengan uang Rp.200.000.

4.1.3 Tepat Harga

Indikator BPNT yang ketiga adalah tepat harga. Tepat harga adalah harga barang yang dijual di *e-warong* sama dengan harga barang yang dijual dipasar pada umumnya. Untuk melihat ketepatan harga dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Tepat Harga

N o	Tepat Harga	Juml ah(ji wa)	Persent ase(%)	Sk or
1	Tepat	53	80.3	159
2	Kurang Tepat	10	15.2	20
3	Tidak Tepat	3	4.5	3
	Jumlah	66	100	182
	Katego ri	Tinggi		

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah keseluruhan responden yang berjumlah 66 orang, dominan memilih kategori tepat dengan jumlah 53 orang dan persentase 80.3%, kategori Kurang Tepat sebanyak 10 orang dengan persentase 15.2% dan sebanyak 3 orang memilih tidak tepat dengan persentase 4.5%. Dapat diketahui ketepatan harga adalah berkategori tinggi dengan skor 182. Harga barang yang ditetapkan oleh *e-warong* sudah sesuai dengan harga pasar pada umumnya tetapi masih ada beberapa yang menjawab kurang dan tidak sesuai dengan harga pasar. Dalam hal ini *e-warong* masih membedakan beberapa KPM sehingga harga menjadi bervariasi.

4.1.4 Tepat Waktu

Waktu pendistribusian BPNT adalah waktu BPNT diserahkan kepada

KPM yang seharusnya rutin setiap awal bulan pada tanggal 1-10. Untuk mengetahui ketepatan waktu dalam pendistribusian BPNT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Tepat Waktu

N o	Tepat Waktu	Juml ah(ji wa)	Persent ase(%)	Sk or
1	Tepat	0	0	0
2	Kurang Tepat	8	12.1	16
3	Tidak Tepat	58	87.9	58
	Jumlah	66	100	74
	Katego ri	Rendah		

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Pada tabel diatas dari keseluruhan jumlah responden yaitu 66 orang dapat dilihat bahwa 8 orang memilih ragu-ragu dengan persentase 12.1%, 58 orang memilih tidak tepat dengan persentase 87.9%. Dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu distribusi BPNT adalah berkategori rendah dengan skor 74. Hal ini dikarenakan pendistribusian BPNT sering dilakukan akhir bulan dan bahkan 2 atau 3 bulan sekali.

4.1.5 Tepat Kualitas

Tepat Kualitas adalah mutu bahan pangan yang diberikan kepada KPM sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan standar kelayakan (layak makan). Layak yang dimaksud adalah barang yang diterima tidak berbau, tidak busuk, tidak cacat, tidak berubah dan masih utuh. Untuk melihat ketepatan kualitas bahan pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Tepat Kualitas

No	Tepat Kualitas	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)	Skor
1	Tepat	43	65.1	129
2	Kurang Tepat	17	25.8	34
3	Tidak Tepat	6	9.1	6
	Jumlah	66	100	169
	Kategori	Tinggi		

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas dari keseluruhan jumlah responden 66 orang, 43 orang memilih tepat dengan persentase 65.1%, 17 memilih kurang tepat dengan persentase 25.8%, 6 memilih tidak tepat dengan persentase 9.1%. dapat disimpulkan bahwa ketepatan kualitas BPNT berada di kategori tinggi dengan skor 169. Hal ini karena kualitas barang pangan yang didistribusikan layak makan, walaupun ada beberapa yang menjawab kurang tepat dan tidak tepat, hal ini karena ada beberapa bahan pangan yang tidak memenuhi standar kelayakan. Misal cacat, berbau dan lain-lain.

4.1.6 Tepat Administrasi

Penetapan administrasi distribusi BPNT yaitu terpenuhinya syarat-syarat administrasi secara benar dan lengkap, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Diambil 1-6 hari setelah BPNT didistribusikan, membawa kartu kombo, serta mengambil resi sebagai bukti bahwa BPNT sudah diambil. untuk melihat ketepatan administrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Tepat Administrasi

No	Tepat Administ rasi	Jumlah (jiwa)	Persenta se(%)	Sko r
1	Tepat	24	36.3	72
2	Kurang Tepat	11	16.7	22
3	Tidak Tepat	31	47.0	31
	Jumlah	66	100	125
	Kategori	Sedang		

Sumber: Data Olahan Responden 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jumlah responden 66 orang, 24 orang memilih tepat dengan persentase 36.3%, 11 orang memilih kurrang tepat dengan persentase 16.7%, 31 orang memilih tidak tepat dengan persentase 47.0%. Dengan indikator skor 125 dan dapat dikategorikan sedang. Hal ini dikarenakan masih ada yang terlambat mengambil BPNT setelah pendistribusian, dan tidak mengambil resi transaksi dari *e-warong*.

4.2 Analisis Pelaksanaan BPNT

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan BPNT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Pelaksanaan BPNT

No	Indikator	Skor
1	Tepat sasaran	189
2	Tepat jumlah	175
3	Tepat harga	182
4	Tepat waktu	74
5	Tepat kualitas	169
6	Tepat administrasi	125
	Total	914
	Kategori	Baik

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa untuk mengukur pelaksanaan BPNT maka

penulis menggunakan skala likert yaitu: T=3, RR=2, dan TT=1. Pernyataan yang mengukur pelaksanaan BPNT terdiri dari 6 indikator yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Jadi untuk menghitung pelaksanaan BPNT dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor yang ada pada pada setiap pernyataan, kemudian, nilai yang diperoleh dari penjumlahan didistribusikan dalam 3 kategori yaitu: sangat baik, baik, tidak baik sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun untuk setiap variabel.

Rekapitulasi tanggapan yang diberikan oleh responden BPNT, setelah direkapitulasi, maka dapat diketahui secara keseluruhan bahwa pelaksanaan BPNT tergolong baik dengan skor 914 dan dengan kata lain pelaksanaan BPNT belum berjalan dengan maksimal, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan.

4.3 Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan membujuk, mempengaruhi orang lain sehingga mereka mengikuti keinginannya yang baik. Dapat disingkat pengaruh yang baik. Dampak positif yang ditimbulkan BPNT adalah dapat meringankan beban pengeluaran KPM, memenuhi kebutuhan gizi anggota KPM, dan memberikan perlindungan sosial terhadap KPM, yang masing-masing variabel tersebut terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. Untuk lebih mengetahui mengenai dampak positif dalam BPNT, dapat dilihat pada indikator berikut:

4.3.1 Meringankan beban pengeluaran

Pengeluaran adalah uang yang dikeluarkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran yang dimaksud termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Sedikitnya jumlah penghasilan menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk memenuhi semua kebutuhan, untuk itulah program BPNT

dibuat oleh pemerintah. Yaitu untuk meringankan beban pengeluaran. Dalam penelitian ini ada 3 pertanyaan dalam mengukur meringankan beban pengeluaran.

Analisis Meringankan beban pengeluaran

Untuk melihat indikator meringankan beban pengeluaran dibagi dalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Rekapitulasi Meringankan Beban Pengeluaran

No	Meringankan pengeluaran	Skor
1	Membantu KPM dalam masalah pengeluaran	287
2	Membantu KPM dalam masalah pangan	227
3	Dapat dialokasikan kebutuhan lain	237
	Jumlah	751
	Kategori	Tinggi

Sumber: Data Olahan Responden 2022

Berdasarkan tabel bahwa untuk mengukur indikator meringankan beban pengeluaran penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur meringankan beban pengeluaran ada 3 yaitu meringankan pengeluaran, membantu KPM dalam masalah pangan, dan dapat mengalokasikan uang untuk keperluan lain. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap pertanyaan, dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pernyataan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan meringankan beban pengeluaran adalah tergolong tinggi dengan skor 751. Hal ini disebabkan karena KPM merasa bahwa BPNT sudah berfungsi sebagai mana mestinya yaitu meringankan beban pengeluaran.

4.3.2 Memenuhi Kebutuhan Gizi

Salah satu tujuan BPNT adalah memenuhi kebutuhan gizi KPM, bantuan pangan yang diberikan berupa beras, telur, ikan, kentang, sayur, buah-buahn dan kebutuhan pokok pangan lainnya. yang dapat meningkatkan gizi keluarga dan diharapkan dapat mencegah stunting pada anak. Dalam kategori memenuhi kebutuhan gizi pada anak dapat di analisis melalui 3 pertanyaan.

Analisis Memenuhi Kebutuhan Gizi

Untuk melihat indikator memenuhi kebutuhan gizi dibagi dalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Memenuhi Kebutuhan Gizi

No	Memenuhi Kebutuhan Gizi	Skor
1	Dapat Membeli Daging/Ikan/Telur	187
2	Dapat Membeli Sayur dan Buah	197
3	Dapat Membeli Kacang-Kacangan	262
	Jumlah	646
	Kategori	Sedang

Sumber: Data Olahan Responden 2022

Berdasarkan tabel bahwa untuk mengukur indikator memenuhi kebutuhan gizi, penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur meringankan beban pengeluaran ada 3 yaitu dapat membeli daging/ikan/telur, dapat membeli sayur dan buah, dan dapat membeli kacang-kacangan. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap pertanyaan, dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pernyataan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan memenuhi kebutuhan gizi berada pada kategori sedang dengan skor 646. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah uang bantuan yang keluar, yaitu senilai RP. 200.000. untuk membeli beras saja sudah menghabiskan bebearapa dari uang tersebut, sisanya baru digunakan untuk membeli lauk pauk, buah, sayur, kacang dan lain-lainnya.

4.3.3 Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah semua bentuk kebijakan untuk merespon beragam masalah sosial dan ekonomi terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakcukupan. Dalam indikator ini,perlindungan sosial yang dimaksud adalah masyarakat miskin merasa kalau pemerintah sudah memperhatikan dan sudah memberikan solusi atas permasalahan yang mereka alami. untuk mengukur perlindungan sosial, maka dianalisis dalam 3 pertanyaan.

Analisis Perlindungan Sosial

Untuk melihat indikator perlindungan sosial dapat dibagi kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan

rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Perlindungan Sosial

No	Perlindungan Sosial	Skor
1	Merasa Terjamin Dalam Hal Pangan	268
2	Merasa Diperhatikan Pemerintah	253
3	Tidak Takut Akan Kelaparan	217
	Jumlah	738
	Kategori	Tinggi

Sumber: Data Olahan Responden 2022

Berdasarkan tabel bahwa untuk mengukur indikator perlindungan sosial, penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur perlindungan sosial ada 3 yaitu merasa dijamin dalam hal pangan, merasa diperhatikan pemerintah, dan tidak takut lagi akan kelaparan. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap pertanyaan, dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pernyataan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan perlindungan sosial berada pada kategori tinggi dengan skor 738. Hal ini karena rata-rata KPM merasa program BPNT sudah merespon keluhan permasalahan yang mereka alami.

4.4 Analisis Dampak Positif

Setelah melihat kategori dari indikator meringankan beban pengeluaran, memenuhi kebutuhan gizi, dan perlindungan sosial. Maka selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi

tanggapan mengenai dampak positif BPNT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Data Dampak Positif BPNT

No	Dampak Positif	Skor
1	Meringankan beban pengeluaran	751
2	Memenuhi kebutuhan gizi	646
3	Perlindungan sosial	738
	Total	2135
	Kategori	Sedang

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk mengukur dampak positif penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur dampak positif ada 3 yaitu meringankan beban pengeluaran, memenuhi kebutuhan gizi, dan perlindungan sosial, dari masing-masing indikator terdapat 3 pertanyaan. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap dampak positif dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pertanyaan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel. Kemudian untuk mengukur dampak positif, hasil rekapitulasi masing-masing pertanyaan kemudian dijumlahkan.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan dampak positif dari BPNT adalah tergolong sedang dengan skor 2135. Hal ini disebabkan karena KPM merasa pelaksanaan BPNT sudah berjalan dengan baik. Dan KPM merasa sangat terbantu dengan adanya BPNT ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali.

4.5 Dampak Negatif

Dampak negatif adalah keinginan membujuk, mempengaruhi orang lain sehingga mereka mengikuti keinginannya yang buruk. Dapat disingkat pengaruh yang buruk. Dampak negatif yang ditimbulkan BPNT adalah merasa bergantung, penyalahgunaan bantuan, rentan menimbulkan konflik. Untuk lebih mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dapat dilihat pada indikator dibawah ini.

4.5.1 Ketergantungan

Pada dasarnya tujuan dari program BPNT adalah untuk membantu meringankan beban pengeluaran KPM, untuk menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang bisa memanfaatkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pangan dapat digunakan untuk keperluan lain atau bahkan ditabung. Sementara fakta dilapangan mengatakan, KPM merasa bergantung terhadap BPNT dan hanya menunggu penyaluran bantuan, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran KPM untuk berusaha dan mengubah perekonomian menjadi lebih baik.

Analisis Ketergantungan

Untuk melihat indikator ketergantungan dapat dibagi kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Ketergantungan

No	Ketergantungan	Skor
1	Merasa bergantung	231
2	Tidak Bekerja	141
3	Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan	254
	Jumlah	626
	Kategori	Sedang

Sumber: Data Olahan Responden 2022

Berdasarkan tabel bahwa untuk mengukur indikator ketergantungan,

penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur ketergantungan ada 3 yaitu merasa dijamin dalam hal merasa bergantung, tidak bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap pertanyaan, dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pernyataan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan ketergantungan berada pada kategori sedang dengan skor 626. Hal ini karena KPM masih merasa ketergantungan terhadap bantuan.

4.5.2 Menimbulkan Konflik

Konflik adalah pertentangan, perselisihan dan perbedaan pandangan antara seseorang dengan seorang lainnya sehingga dapat menimbulkan permusuhan, rasa benci, rasa takut, serta kurangnya rasa percaya. Kesalahan dalam pendataan serta tidak memahami administrasi dapat menimbulkan konflik. Konflik yang biasanya terjadi yaitu kesalahan pendataan kepada masyarakat, tidak memahami prosedur dalam BPNT juga dapat menyebabkan konflik, konflik internal, dan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Dimana konflik ini mengakibatkan rasa kurang percaya terhadap pendataan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Analisis Menimbulkan Konflik

Untuk melihat indikator menimbulkan konflik dapat dibagi kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Menimbulkan Konflik

No	Menimbulkan Konflik	Skor
1	Kekeliruan pada Pendataan	216
2	Tidak Memahami Prosedur	180
3	Keterlambatan Penyaluran	198
	Jumlah	594
	Kategori	Sedang

Sumber: Data Olahan Responden 2022

Berdasarkan tabel bahwa untuk mengukur indikator menimbulkan konflik, penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur ketergantungan ada 3 pertanyaan yaitu kekeliruan pada pendataan, tidak memahami prosedur penyaluran, dan keterlambatan penyaluran. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap pertanyaan, dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pernyataan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan menimbulkan konflik berada pada kategori sedang dengan skor 594. Hal ini karena KPM kurang memahami prosedur dalam penerimaan bantuan, tidak tepatnya waktu dalam penyaluran, dan kekeliruan pendataan dari petugas.

4.6 Analisis Dampak Negatif

Setelah melihat kategori dari indikator merasa bergantung dan rentan menimbulkan konflik. Maka selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan mengenai dampak Negatif BPNT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Rekapitulasi Data Dampak Negatif BPNT

No	Dampak Negatif	Skor
1	Merasa bergantung	626
2	Rentan menimbulkan konflik	594
	Total	1220
	Kategori	Sedang

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 5.21 bahwa untuk mengukur dampak negatif penulis menggunakan skala likert yaitu: SS= 5, S= 4, RR= 3, TS=2, STS=1. Pernyataan yang mengukur dampak negatif ada 2 yaitu merasa bergantung dan rentan menimbulkan konflik. Jadi untuk menghitung nilai dari setiap dampak negatif dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada setiap pernyataan. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan, didistribusikan kedalam 3 kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan rentang nilai masing-masing kategori yang telah disusun pada setiap variabel.

Mengenai analisis tanggapan yang diberikan oleh responden KPM BPNT, setelah direkapitulasi maka diketahui secara keseluruhan dampak negatif dari BPNT adalah tergolong sedang dengan skor 1220. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya bantuan yang diturunkan itu berdampak positif. kenyataannya, masih ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh BPNT ini, adanya ketergantungan dan menimbulkan konflik internal.

V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BPNT terdiri dari tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat

administrasi. Pelaksanaan BPNT berada pada kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa BPNT sudah berjalan sesuai dengan aturan dari pemerintah, walaupun masih ada beberapa indikator yang berada dikategori sedang dan rendah yaitu tepat waktu dan tepat administrasi. Hal ini bisa disebabkan oleh pemerintah, dari *e-warong*, dan bahkan dari KPM itu sendiri. Tepat waktu berada pada kategori rendah, disebabkan oleh pemerintah atau yang menjalankan program masih belum sesuai dengan pendistribusian sesuai dengan aturan yang sudah ada, sering terjadinya keterlambatan dalam penyaluran. Tepat administrasi berada pada kategori sedang disebabkan masih kurangnya pemahaman KPM terhadap prosedur dalam pengambilan BPNT.

2. BPNT bisa membawa dampak positif juga dampak negatif bagi penerimanya. Dampak ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dampak positif BPNT dalam penelitian ini adalah meringankan beban pengeluaran berada pada kategori tinggi, memenuhi kebutuhan gizi berada pada kategori sedang, perlindungan sosial berkategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan dampak positif BPNT pada penelitian berada pada kategori sedang, ini menandakan bahwa masyarakat belum sejahtera dalam hal pangan. masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Sementara sebuah program juga dapat menyebabkan dampak negatif, dampak negatif dalam penelitian ini adalah merasa bergantung berada pada kategori sedang dan menimbulkan konflik berada pada kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan dampak negatif dari BPNT berada pada kategori sedang. ini menandakan bahwa masyarakat masih melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan dalam memahami BPNT tersebut.

SARAN

1. KPM BPNT harus menyadari sepenuhnya bahwa bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran sementara waktu, bukan untuk selamanya. untuk itu KPM harusnya mempunyai program kedepannya untuk lebih giat dan lebih berusaha lagi dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk jangka panjang
2. Petugas program harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang BPNT kepada KPM, juga melakukan pendataan secara berkala supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman.
3. Pemerintah diharapkan dapat mengupayakan pendistribusian program BPNT di Desa Balam Merah supaya berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan tidak ada lagi keterlambatan pendistribusian bantuan sehingga sesuai dengan indikator pelaksanaan, yaitu tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, C. (1981). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjaja Mada.
- Gunawan. (2014). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjaja Mada Universitas Press.
- Hadi, S. P. (1995). *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*. Semarang, UGM.
- Lewis, O. (1983). *Kebudayaan Kemiskinan: Dalam Kemiskinan di Perkotaan di Edit oleh Persudi*. Yayasan Obor Indonesia.

- Pasaribu, T., & Simandjuntak, P. (1986). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito.
- Rohmad, Z. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: Ombak.
- Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (2006). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyanto, E. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Suud, M. (2006). *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yoserizal. (2011). *Dalam Ideks Kemiskinan Manusia*. Pekanbaru: Alaf Riau.